

Jurnal Pendidikan

**EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

Moch Yusuf S. S., S.Pd.I.

NPM. 20141010008



**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman. (2) mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

Jenis Penelitian ini adalah *evaluatif expos facto* dengan menggunakan model *CIPP*, meliputi evaluasi *contex*, *input*, *process* secara deskriptif kualitatif dan evaluasi *product* secara deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, Adapun Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara validasi data, reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel selanjutnya dianalisis dengan metode *CIPP*.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) bahwa empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman telah melaksanakan pendidikan inklusif. (2) bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman telah melaksanakan pendidikan inklusif dengan cukup baik.

Kata Kunci: *Evaluasi Program, Pendidikan Inklusif.*

ABSTRACT

This study aims to: (1) knowing the implementation of inclusive education programs in four Muhammadiyah junior high schools in Sleman Regency. (2) find out the results of evaluating the implementation of an inclusive education program at Muhammadiyah junior high school in Sleman Regency.

This type of research is evaluative *expos facto* using the *CIPP* model, which includes evaluation of *contex*, *input*, qualitative descriptive process and quantitative descriptive product evaluation. Data collection techniques carried out through interviews, observation and documentation, The data analysis technique was carried out by means of data validation, data reduction, presentation of data in the form of tables then analyzed by the *CIPP* method.

The results of this study are (1) that four Muhammadiyah junior secondary schools in Sleman Regency have implemented inclusive education. (2) that the implementation of inclusive education programs in four Muhammadiyah junior secondary schools in Sleman Regency has implemented fairly inclusive education.

Keywords: *Program Evaluation, Inclusive Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan Inklusif lahir berawal dari meningkatnya kesadaran bahwa semua warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil, dan pendidikan yang bermutu dengan tanpa diskriminatif. Menurut UU Sisdiknas tahun 2003, pasal 15 pemerintah telah mengesahkan pendidikan khusus, yaitu pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”.

Di Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang melayani Penuntasan Wajib Belajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sementara itu, lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di Ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SDLB dan SLB yang jauh dari tempat tinggalnya.

Pendidikan inkusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007), pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal.

Dalam perkembangan pendidikan inklusif, Persyarikatan Muhammadiyah melalui amal usaha Muhammadiyah (AUM) bidang pendidikan telah berperan dalam melayani anak berkebutuhan khusus (ABK). Berdasarkan ijin operasional Dinas

Pendidikan Kabupaten Sleman tahun 2015, terdapat empat sekolah menengah pertama (SMP) Muhammadiyah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sekolah tersebut adalah SMP Muhammadiyah 1 Sleman, SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean dan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan. Bahkan pada tahun ajaran 2017/2018, beberapa SMP Muhammadiyah lainnya mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Menyelenggarakan pendidikan inklusif tidaklah mudah, dibutuhkan pengelolaan atau manajemen yang baik. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. Manajemen pendidikan inklusif merupakan proses yang terkait erat dengan tujuan dan efektifitas serta efisiensi penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. (Dadang Garnida, 2015: 80)

Pada dasarnya manajemen pendidikan inklusif tidak jauh berbeda dengan manajemen pendidikan secara umum, hanya saja ada hal-hal khusus yang menjadi pusat perhatian dalam manajemen pendidikan inklusif, dikarenakan kebutuhan akan peserta didik ABK adalah bermacam-macam, sehingga perlakuannya harus tepat.

Beberapa landasan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendiknas No. 70 tahun 2009 dan Direktorat Pembina PKLK Dikdas (2012), antara lain (1) Permendiknas No. 70 Tahun 2009, bahwa Pendidikan Inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya. (2) Direktorat Pembina PKLK Dikdas (2012) menyebutkan bahwa pendidikan inklusif diberikan kepada semua anak terlepas dari kemampuan ataupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang

sama. (3) Direktorat Pembina PKLK Diksa (2012) bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan inklusif adalah keterlibatan, dimana penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan semua komponen pendidikan terkait. (4) Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1, bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. (5) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 7 yang menyebutkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan ABK sesuai minat, bakat dan potensi. (6) Direktorat Pembina PKLK (2012), bahwa salah satu prinsip pembelajaran sekolah inklusif adalah prinsip individual.

Evaluation is process whice determines the extent to which objectives have been achieved. Artinya “Evaluasi adalah proses yang menentukan kondisi dimana tujuan telah mudah tercapai”. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta memberlakukan suatu penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2007 :222). Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan nilai atau harga tentang sesuatu, termasuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Salah satu bentuk evaluasi dalam pendidikan adalah evaluasi dengan Metode CIPP. Model CIPP merupakan singkatan (*akronim*) dari *context evaluation, input evaluastion, process evaluation, dan product evaluation* yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun 1968 di Ohio State Univercity dan berorientasi pada pengambilan keputusan. (Mbolu. 1995: 62)

Evaluasi terhadap manajemen pendidikan inklusif di sekolah menengah pertama Muhammadiyah Kabupaten Sleman dengan menggunakan model CIPP merupakan jenis evaluasi yang sesuai, dengan beberapa pertimbangan bahwa model CIPP memiliki langkah-langkah yang jelas dalam pengungkapan setiap urutan program. Melalui model CIPP dapat dianalisis secara detail mulai dari hal-hal yang

melatarbelakangi pendidikan inklusif (*context*), bentuk perencanaan program pendidikan inklusif (*input*), pelaksanaan pendidikan inklusif (*process*), serta hasil pendidikan inklusif (*product*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada manajemen pendidikan inklusif pada empat sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP. Hasil evaluasi dalam penelitian ini dipaparkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat, keterangan, pernyataan bermakna. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dan diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Subyek atau informan penelitian ini mencakup kepala sekolah dan 1 guru penanggungjawab program inklusif di empat sekolah (SMP Muhammadiyah 1 Sleman, SMP Muhammadiyah 1 Godean, SMP Muhammadiyah 2 Godean dan SMP Muhammadiyah 1 Moyudan).

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di empat sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. Dalam mengevaluasi tersebut dipergunakan metode CIPP yang meliputi empat tahapan evaluasi, yaitu tahap *context*, *input*, *process* dan *product*. *Context evaluation* membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program. Tahapan konteks evaluasi ini merupakan tahapan yang memuat tentang latar belakang pendidikan inklusif dan tujuan dilaksanakan pendidikan inklusif. Adapun *input evaluation* merupakan tahapan yang memuat tentang input peserta didik, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan sekolah, serta kurikulum sekolah. *Process evaluation* merupakan tahapan pengelolaan dan pelaksanaan manajemen pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, *product evaluation* meliputi hasil akademik dan non akademik bagi peserta didik ABK.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian, dihasilkan pembahasan sebagai berikut:

1. Evaluasi Konteks

- a. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif telah memiliki latar belakang dan tujuan yang sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dimana peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif mengutamakan siswa berkebutuhan khusus dari lingkungan masyarakat terdekat. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Sapon-Shevin O'neil (1995) bahwa "pendidikan inklusif sebagai suatu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya".
- c. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif telah mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, hal ini telah sesuai dengan Permendiknas No. 70 pasal 4 ayat 1 dimana "Pemerintah kabupaten/kota minimal menunjuk satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.

2. Input

- a. SMP Muhammadiyah dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif, pada saat penerimaan peserta didik baru, menerima semua calon siswa yang mendaftar. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 dimana peserta didik

dengan kelainan fisik, emosional, mental, social atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini juga sesuai dengan UU nomor 23 pasal 51 yang berbunyi “ anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan *aksesibilitas* untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

- b. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif, Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) sudah memenuhi ketentuan yaitu minimal satu,. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1 yang menentukan bahwa “pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif”.
- c. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif menggunakan kurikulum standar nasional (kurikulum 2013) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan Direktorat PKLK Pendidikan Dasar (2012) bahwa “kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum.
- d. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif belum memberikan bimtek, workshop, pelatihan kepada semua pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga masih banyak pendidik dan tenaga pendidikan yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam melaksanakan kegiatan pendidikan inklusif. Keadaan ini tentunya juga menjadi tanggungjawab pemerintah setempat. Hal ini belum sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 10 ayat 3, 5, dan 6 yang menjelaskan bahwa “pemerintah kabupaten/kota wajib meningkatkan

kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif”.

3. Proses

- a. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif, telah melaksanakan asesmen. Asesmen tersebut dilaksanakan dalam rangka mengetahui karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar pembuatan kurikulum, pembuatan perangkat pembelajaran serta proses pembelajaran yang dilakukan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif.
- b. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif belum melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan inklusif. Kegiatan pendidikan inklusif lebih banyak dilaksanakan oleh Guru Penanggung jawab program, Guru BK dan Guru Pembimbing Khusus Inklusif (GPK). Hal ini belum sesuai dengan prinsip keterlibatan seperti yang dibenarkan oleh Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) bahwa “salah satu prinsip penyelenggaraan inklusif adalah prinsip keterlibatan, dimana penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait”.
- c. SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif, belum sepenuhnya melaksanakan program pembelajaran individual (PPI),. Hal ini belum sesuai dengan Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar (2012) tentang salah satu prinsip pembelajaran sekolah inklusif yaitu prinsip individual, dimana “guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar dan perilakunya,

sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sesuai”.

4. Output

SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan manajemen pendidikan inklusif senantiasa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa berkebutuhan khusus agar dapat menikmati program wajib belajar 9 tahun, bahkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan atas atau berikutnya. Hal ini sesuai dengan UU nomor 23 pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan *aksesibilitas* untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”. Mereka diupayakan naik kelas, sehingga nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) dibuat sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa berkebutuhan khusus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada evaluasi manajemen pendidikan inklusif di empat SMP Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Inklusif di SMP Muhammadiyah Kabupaten Sleman telah berjalan dengan efektif dan telah sesuai dengan prinsip pokok dalam pendidikan inklusif, yaitu keberpihakan pada ABK dengan melangsungkan pendidikan bersama peserta didik reguler, telah terlaksananya kegiatan asesmen dalam rangka mengetahui karakteristik dan tingkat kebutuhan peserta didik ABK dan kurikulum yang digunakan telah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ABK.
2. Hal yang perlu diperbaiki dalam pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah kabupaten Sleman adalah keterlibatan semua komponen sekolah dalam pendidikan inklusif, serta proses pembelajaran individual harus dikembangkan.

3. Guna peningkatan mutu pendidikan inklusif di SMP Muhammadiyah Kabupaten Sleman, perlu peningkatan kegiatan pembinaan dan monitoring dari Majelis Dikdasmen Daerah.

DAFTAR ISI

- Arikunto, Suharsiwi, 2003, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsiwi dan Lia Yuliana, 2008, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Arikunto, Suharsiwi, 2007, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Budiyanto, 2017, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Direktorat Pembinaan SLB, 2007, *Pedoman Umum Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SLB
- Fatah, Nanang, 2001, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Garnida, Dadang, 2014, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Bandung: PT Refika Aditama
- Kompri, 2014, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Mbolu, J, 1995, *Evaluasi Program, Konsep Dasar, Pendekatan Model, Prosedur, Pelaksanaan*, Malang: Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas.

